

## Peran Kepemimpinan dalam Peningkatan Pembangunan

Hermanu Iriawan<sup>1</sup>, Edyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, IISIP YAPIS Biak, Papua

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP YAPIS Biak, Papua.

Email: [hermanu.iriawan@gmail.com](mailto:hermanu.iriawan@gmail.com), [edypapua10@gmail.com](mailto:edypapua10@gmail.com)

### Abstrak

Kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan dalam organisasi karena menjadi faktor penentu keberhasilan. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya. Adapun kepala kampung merupakan pemimpin formal di sebuah kampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam kegiatan pembangunan di kampung, oleh karena itu diperlukan kepala kampung yang jujur, bijaksana, dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung ditambah dengan dukungan perangkat kampung yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala kampung dalam peningkatan pembangunan pada kampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library search), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 indikator peran kepemimpinan kepala kampung dalam peningkatan pembangunan, senantiasa berusaha untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat termasuk senantiasa memberi motivasi kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping itu, senantiasa berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat yang dibuktikan dengan program-program yang melibatkan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Pembangunan, Kampung.

### PENDAHULUAN

Kepemimpinan sangat penting dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan untuk mengantur kinerja organisasi (Iriawan, 2020). Lebih lanjut, menurut M. Alhudhori (2017) suatu organisasi pasti membutuhkan pemimpin yang efektif karena kepemimpinan sangat strategis untuk pencapaian visi misi dan tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang

berguna bagi organisasi (Wasahua, 2017).

Menurut Rasyid dalam Edyanto & Karsiman (2018) kepemimpinan yang tepat juga dapat mendukung pembangunan. Pembangunan pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan (Suarsih et al., 2017). Kehidupan yang lebih baik sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan (Husnul Imtihan, Wahyunadi, 2017). Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun

aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya (Widjajanti, 2011).

Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah Undang-undang tidak berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat) (Iriawan, 2020). Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan Undang-undang, kebijakan pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan

memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan kampung. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan civil society sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah pembangunan bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari “pembangunan masyarakat kampung”. “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan representasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya kemandirian bangsa dengan menempatkan pembangunan

kampung sebagai tolak ukur pembangunan nasional.

Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat kampung dirasakan semakin penting (Rahmawati et al., 2021). Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa nampaknya telah memberikan kesempatan bagi masyarakat

Kampung untuk berpacu padu dalam pembangunan membentuk satu komunitas yang berdaya saing berlandaskan asas “gotong royong”. Kesempatan tersebut antara lain terprogramnya Dana Desa (ADD) yang dapat memberikan dampak bagi kemajuan pembangunan kampung. Visi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka diterbitkan Sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan “Nawacita”. Butir ke tiga dari Sembilan agenda ini yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan representasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya kemandirian bangsa dengan menempatkan pembangunan desa

sebagai tolak ukur pembangunan nasional.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan langsung, misalnya pembangunan ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan (Edyanto & Karsiman, 2018). Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokrasi sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan undang-undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam

mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri. Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini mengangkat Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung. Penulis tertarik mengangkat tema tersebut diatas karena peran kepala kampung sangat penting dan dibutuhkan demi tercapainya pembangunan di kampung terutama kampung yang ada di wilayah yang masih tertinggal baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kepemimpinan kepala kampung memegang peranan penting dan berfungsi sebagai motor penggerak dalam jalannya roda pemerintahan kampung.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka/ *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber data primer yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Kepemimpinan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (*library*

*research*). Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah analisis isi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pembangunan.**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka untuk menganalisis Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung, adapun indikator yang digunakan, yaitu:

#### **1. Pembinaan Masyarakat.**

Mengingat kedudukan yang penting dalam kampung adalah masyarakat. Masyarakat

senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran dalam meningkatkan pembangunan kampung. Masyarakat kampung memiliki hubungan sosial lebih luas dari pada pemerintah kampung, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman dan ketaatan. Masyarakat meyakini kepercayaan pemerintahan kampung dalam kepemimpinnya.

Peranan kepala kampung sebagai pemimpin informal di kampung terlihat kongkrit ketika memberi nasihat, saran, dan pendapat serta bagaimana kepala kampung mengendalikan perilaku masyarakat Kampung. Kepatuhan warga kepada pemimpin karena kepala kampung dipandang sebagai pengembang amanat leluhur, hingga apa yang diucapkan kepala kampung akan dipatuhi termasuk larangan untuk tidak membicarakan hal-hal yang menyebabkan konflik, sehingga kepercayaan antara masyarakat dan pemimpin selalu terjaga.

Masyarakat adat kampung memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain, sehingga partisipasi tokoh masyarakat dalam membina kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran aparat kampung dalam meningkatkan pembangunan kampung, mengacu dari pengkajian kondisi, situasi, tatanan kehidupan, identifikasi masalah dan selanjutnya kesimpulan yang dituangkan dalam sebuah rencana pembangunan jangka menengah kampung yang pada dasarnya adalah melibatkan semua pihak, baik gereja, adat maupun pemuka agama dalam suatu perencanaan suatu mufakat dan dijadikan

sebagai acuan/panduan yang disebutkan dalam rencana kerja pemerintah kampung dalam 1 tahun.

Kepala kampung hendaknya senantiasa memotivasi masyarakat untuk memiliki rasa kebersamaan agar rasa memiliki kampung sebagai tempat kelahiran, agar masyarakat bisa berpandangan bahwa kampung adalah milik kita bersama, dan masyarakat tidak menuntut hak pembangunan tetapi kewajiban masyarakat adalah turut berpartisipasi dalam semua program pembangunan.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Kepala kampung mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala distrik dan diteruskan kepada bupati yang bersangkutan. Adapun pemberdayaan masyarakat desa

merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah di desa atau kampung.

Adapun program kebijakan yang dilakukan untuk mendorong upaya peningkatan sumber daya manusia diantaranya melalui bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa secara berkelanjutan. Menciptakan lapangan kerja lokal bagi ibu-ibu/kaum perempuan melalui sebuah wadah/tim kebersihan kampung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran kepemimpinan kepala kampung dalam mendorong peningkatan

pembangunan di kampung menunjukkan bahwa ada 2 indikator peran kepemimpinan kepala kampung dalam peningkatan pembangunan yaitu kepala kampung beserta aparat kampung senantiasa berusaha untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat termasuk senantiasa memberi motivasi kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan kampung. Disamping itu, kepala kampung senantiasa berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat di kampung yang dibuktikan dengan program-program yang melibatkan masyarakat kampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edyanto, & Karsiman. (2018). Leadership Bupati dalam Pembangunan di Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw). *Sosio E-Kons*, 10 (2), 143. <https://doi.org/10.30998/sos>

- ioekons.v10i2.2693
- Husnul Imtihan, Wahyunadi, F. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Neo-Bis*, 11 (1).
- Iriawan, H. (2020). Peranan Leadership dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 40–45. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.2224>
- M. Alhudhori, W. A. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Bersaudara Kabupaten Bungo. *J-Mas*, 2 (1), 23–32.
- Rahmawati, Y., Anugrah, F. F., Hati, E. M., & Roziqin, A. (2021). Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19. *JSDS*, 2(1), 39–51.
- Suarsih, S., Sunjaya, D. K., Setiawati, E. P., Wiwaha, G., Herawati, D. M., & Rinawan, F. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 2 (4), 211–217. <https://doi.org/10.24198/jsk.v2i4.12500>
- Wasahua, O. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Diklat dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans RI. *Sosio E-Kons*, 9(1), 86–92.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.
- Peraturan-peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan  
Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun  
2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden No 2 Tahun  
2015 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka  
Menengah Nasional Tahun  
2015-2019.